Jurnal
JAMBURA
ILMU KOMUNIKASI
e-ISSN : 3026-2380 jik.fis.ung.ac.id
Volume 1 Issue 2, 2023
DOI: 10.37905/

Analisis Peran Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Papua dalam Aktivitas *Media Relations*

Nurjayanti[1], Harmin Hatta[2], Lidia Numberi[3]
[1]Universitas Negeri Makassar
[2]Universitas Negeri Makassar
[3]Universitas Muhammadiyah Papua

ABSTRACT

Pemerintah provinsi Papua melalui biro Humas dan Protokol dengan tugas pokok mempublikasikan kegiatan pemerintah provinsi Papua melalui media massa guna menciptakan dan membina hubungan yang positif, baik dalam lingkup pemerintah provinsi Papua maupun kepada masyarakat Papua. Biro Humas dan Protokol suatu instansi pemerintah merupakan ujung tombak pengelolaan informasi dalam upaya menciptakan tata kelola humas yang baik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik pula. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua dalam aktivitas dan pengelolaan hubungan dengan media massa (*media relations*) serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua dalam aktivitas *media relations* tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pejabat dan staf biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua telah memenuhi dan menjalankan perannya dengan sangat baik dalam aktivitas *media relations.* Terbukti dari tersedianya dokumen perjanjian kerja sama dengan media massa, adanya pelayanan protokoler serta aktivitas dokumentasi dan publikasi untuk penyebarluasan informasi. Faktor yang memengaruhi pemenuhan peran tersebut ialah adanya kerja sama, tanggung jawab, dan komitmen dari staf humas, dukungan pimpinan, jumlah dan kualifikasi staf yang memadai. Adapun kendala yang diahadapi biro Humas dan Protokoler sekretariat daerah provinsi Papua adalah minimnya konfirmasi awal dari pihak media massa terkait penempatan halaman pemberitaan dan gambar yang terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan kerja sama. Sehingga, diperlukan sistem kontrol yang memberi hak kepada biro Humas dan Protokol sekretariat derah provinsi Papua agar pemberitaan di media massa sesuai dengan isi perjanjian kerja sama.

Keywords : Biro Humas dan Protokol, Sekretariat Daerah, Media Massa, Media Relations

To cite this article (APA Style):

Nurjayanti, Harmin Hatta & Lidia Numberi. (2023). Analisis Peran Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Papua dalam Aktivitas Media Relations. *Jambura Ilmu Komunikasi*. *X*(X), XX-XX. https://doi.org/xxxx

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Copyright © 2023 The Author(s).

Correspondence: Nurjayanti, Universitas Negeri Makassar, Jl. Dg. Tata Raya, Mallengkeri, kelurahan Parangtambung, kecamatan Tamalate, kota Makassar. Kode Pos: 90224. *Email: nurjayanti@unm.ac.id*

PENDAHULUAN

Dewasa ini keberadaan bagian humas semakin tidak terelakkan bagi suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Termasuk bagi pemerintah provinsi Papua melalui biro Humas dan Protokol yang memiliki tugas pokok dan fungsi mempublikasikan segala aktivitas pemerintah untuk membina hubungan yang semakin positif, baik kepada pihak-pihak dalam lingkup pemerintah provinsi Papua itu sendiri maupun kepada masyarakat provinsi Papua secara umum.

Pemerintah provinsi sebagai suatu organisasi memiliki strukturnya sendiri untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat pada berbagai aspek kepentingan, baik secara formal maupun nonformal sesuai dengan ketentutan hukum positif yang ada di Indonesia, dan salah satu bagian dalam struktur organisasi pemerintah tersebut ialah Hubungan Masyarakat yang kemudian disingkat dengan Humas, yang berperan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah maupun masalah publik lainnya (Rahmat & Bakti, 2016). Tantangan humas kedepannya semakin berat dengan adanya dinamika pluralitas yang tidak semuanya selaras dengan keputusan pemerintah. Hal tersebut menuntut humas agar lebih mampu mengakomodir aspirasi masyarakat dan tidak terkesan berpihak pada pemerintah saja. Atas dasar ini yang kemudian menjadi motivasi bagi humas untuk membangun hubungan yang harmonis dengan media massa atau insan pers.

Media massa baik cetak dan elektronik memiliki fungsi kontrol sosial yang berperan besar dalam memengaruhi opini publik (Choiriyati, 2015). Bagi pemerintah provinsi Papua, media massa adalah media komunikasi untuk menyiarkan informasi, gagasan, serta sikap kepada berbagai *stakeholder* dan masyarakat secara umum (heterogen). Untuk itu, hubungan dengan media massa (*media relations*) sangat penting untuk dijalin dengan baik.m *Media relations* dalam konteks penelitian ini berbicara tentang hubungan antara biro humas dengan media massa dalam hal ini ialah para jurnalis sebagai individu yang berhubungan langsung dalam proses publikasi berita pemerintahan provinsi Papua.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti melalui wawancara dengan beberapa staf humas sekretariat daerah provinsi Papua dan melalui hasil pengamatan terhadap dokumen kerja sama dan hasil pemberitaan yang dimuat pada media massa, ditemukan bahwa hubungan antara biro humas dengan para jurnalis terbilang harmonis. Atas dasar itu, sehingga penelitian ini berupaya

menganalisis peran biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua dalam upayanya menciptakan dan mengelola hubungan yang harmonis dengan media massa yang ada di provinsi Papua. Meskipun tidak dapat ditampik bahwa masih terdapat hambatan dalam aktivitas *media relations* antara biro Humas dan Protokol dan media massa di provinsi Papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap kepala biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua, , kepala sub bagian kerjasama media, dan 2 orang jurnalis media massa. Selain menggunakan teknik wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi atau pengamatan langsung, dokumentasi, dan studi Pustaka. Penelitian ini dilakukan di kantor biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua.

HASIL

Aktivitas Media Relations

Hubungan antara biro Humas dan Protokol dengan media massa selama ini telah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dalam aktivitas *media relations* tersebut. Peran biro Humas dan Protokol dalam meneruskan pesan visi dan misi pemerintah provinsi Papua yaitu Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera kepada masyarakat luas, terus mengedepankan muatan dan konten-konten yang edukatif, seperti yang disampaikan kepala biro Humas dan Protokol, Israil Ilolu bahwa sebagai corong pemerintahan, pihaknya akan memberikan keterbukaan akses informasi bagi masyarakat luas serta menjadi penyambung informasi pembangunan dari masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam lingkup pemerintah provinsi Papua yang sejalan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang menerangkan bahwa segala informasi harus diketahui oleh masyarakat luas.

Selain itu, hasil wawancara dengan kepala sub bagian kerjasama media, Feri Uduas mengemukakan bahwa peran biro Humas dan Protokol dibantu oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) yang berperan dalam menyediakan informasi pembangunan yang ada di provinsi Papua, sehingga informasi tersebut dapat diterima lebih cepat oleh masyarakat.

Biro Humas dan Protokol sekretariat provinsi Papua sangat membantu para jurnalis dalam aktivitas peliputan berita, termasuk aktivitas wawancara narasumber untuk mendukung publisistas yang akurat dan berimbang. Hal ini sejalan dengan informasi yang diberikan oleh Yamander, seorang jurnalis Cenderawasih Pos. Selain itu, diperoleh informasi melalui Hesti, seorang wartawan TVRI Papua yang menyatakan bahwa selama ini biro humas telah menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama dengan baik, terutama dalam penayangan informasi tentang pembangunan dan program strategis gubernur Papua yaitu Gerbangmas Hasrat Papua.

Bentuk aktivitas *media relations* lainnya yang juga sering dilakukan biro Humas dan Protokol ialah menggelar jumpa pers untuk melakukan klarifikasi terhadap suatu isu yang muncul di tengah masyarakat. Hal tersebut dikemukakan oleh kepala sub bagian kerjasama media, Fery Uduas.

Kendala yang Dihadapi dalam Aktivitas Media Relations

Beberapa kendala yang terjadi dalam aktivitas *Media Relations* biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua dikemukakan oleh Fery Uduas, diantaranya ialah penyampaian berita yang penulisan serta halaman pemberitaannya yang tidak sesuai, di mana pada perjanjian kerjasama tertuang bahwa pemberitaan ditempatkan pada halaman pertama media cetak, namun pada kenyataannya terkadang media menempatkan pada halaman lain. Melalui perjanjian kerjasama, pemberitaan pemerintah provinsi Papua harusnya ditempatkan pada rubrik atau halaman Papua Bangkit. Selain itu, ukuran gambar pada pemberitaan pemerintah provinsi dibuat lebih kecil dibanding pemberitaan tentang pemerintah kabupaten/kota.

Ketidak sesuaian tersebut juga telah diobservasi peneliti dengan melakukan pengamatan terhadap kesalahan pada pemberitaan yang dimaksud dan dicocokkan dengan dokumen perjanjian kerjasama antara biro Humas dan Protokol dengan pihak media massa.

PEMBAHASAN

Biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua memiliki peran penting dalam menjaga sistem komunikasi pemerintah dengan *stakeholder* dan masyarakat, sehingga kebijakan dan program pembangunan akan lebih tepat sasaran. Biro Humas dan Protokol hadir sebagai wakil pemerintah dalam mendengar aspirasi masyarakat dan mengupayakan agar himbauan, arahan,

instruksi dari pemerintah dapat didengar oleh masyarakat melalui berbagai media komunikasi seperti media massa cetak maupun elektronik (Siswanto & Abraham, 2016).

Media massa memiliki peran dan pengaruh, terutama di era perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini, humas pemerintahan harus lebih jeli dalam memanfaatkan media massa dengan maksimal sehingga upaya publisistas menjadi efektif dengan tujuan akhir yaitu menciptakan dan menjaga citra positif pemerintah. Hal ini disadari sepenuhnya bahwa komunikasi yang baik dan berkualitas dapat mendekatkan pemerintah pada pencapaian terlaksananya visi dan misi pemerintah provinsi Papua.

Biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua tidak hanya menjalankan fungsi publisitas, tapi juga sebagai fasilitator komunikasi dengan peran membina hubungan baik secara internal dan eksternal. Hubungan internal yang dimaksud ialah hubungan antara sekretariat daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup provinsi Papua agar hubungan kerja terjalin harmonis yang akan berdampak pada kualitas kinerja unsur terkait. Sementara yang dimaksud dengan hubungan eksternal ialah hubungan antara sekretariat daerah dengan masyarakat umum secara luas.

Biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua dalam aktivitasnya juga mengikutsertakan para jurnalis pada beberapa kegiatan pemerintah untuk diliput secara langsung, sehingga biro humas tidak perlu lagi membuat *press release*. Melalui cara ini, biro humas dapat mengefisienkan waktu untuk bekerja. Pada kegiatan-kegiatan formal, biro humas telah menyediakan tempat atau ruangan khusus bagi para jurnalis untuk melakukan peliputan atau yang biasa dikenal dengan ruangan media center. Selain penyediaan media center, bentuk pelibatan jurnalis dapat juga dilihat ketika biro humas melakukan konferensi pers untuk mengklarifikasi suatu isu tertentu yang berkaitan dengan wewenang pemerintah provinsi Papua yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat.

Aktivitas *media relations* biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua menunjukkan bahwa proses komunikasi yang terjalin antara biro Humas dan Protokol dengan media massa ialah komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang menempatkan komunikator dan komunikan dalam posisi yang setara, termasuk dalam hal pertanggung jawaban pemberitaan, baik media massa maupun biro humas sama-sama memiliki tanggung jawab yang setara. Karena komunikasi berlangsung dua arah, sehingga proses pemberitaan yang dilakukan media massa

mayoritas telah sesuai dengan perjanjian kerjasama. Meskipun tidak bisa dielakkan bahwa kesalahan penulisan, penempatan halaman pemberitaan dan gambar terkadang tidak sesuai. Namun, biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua menyadari itu semua sebagai suatu hal yang tidak disengaja oleh pihak media massa, sehingga proses komunikasi dua arah juga dapat berperan dalam meminimalisir atau memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Misalnya dengan memuat berita kembali yang telah diperbaiki pada edisi berikutnya.

Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat dikatakan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua sebagai corong komunikasi telah dijalankan. Relevan yang dikemukakan oleh Cutlip & Centre (2006) bahwa humas harus menciptakan, menjaga, dan mengelola dengan baik proses keberlangsungan komunikasi dua arah dan bertindak sebagai fasilitator komunikasi antara organisasi dengan publiknya (eksternal dan internal), serta menjaga saluran komunikasi tetap transparan dan mudah diakses.

KESIMPULAN

Aktivitas *Media Relations* biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua meskipun sudah berjalan dengan baik selama ini, namun masih tetap harus melakukan pembenahan pada berbagai hal terkait. Yang perlu diprioritaskan adalah penyelesaian kendala yang dihadapi biro Humas dan Protokol, di mana pihak media massa kadang-kadang tidak konsisten dalam menjalankan isi perjanjian kerja sama.

Biro Humas dan Protokol sebaiknya mengajukan sistem kontrol yang juga dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang memungkinkan biro Humas dan Protokol melakukan pemantauan atas rencana pemberitaan aktivitas pemerintah provinsi Papua sebelum diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggoro, L. 2000. *Press Relations.* Jakarta: Bumi Aksara

Cutlip, S. M., & Center, A. H. (2006). Effective public relations: Pathways to public favor. *(No Title)*.

Baines, P., Egan, J., & Jefkins, F. (2007). *Public relations*. Routledge.

Putra, I. G. N. (1999). *Manajemen Hubungan Masyarakat*. Yogyakarta: Andi Offset.

Jurnal *Online*

Rahmat, A., & Bakti, I. (2016). Kinerja Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. *Jurnal Kajian Komunikasi*, *4*(2), 133-141. https://doi.org/10.24198/jkk.v4i2.8612

Choiriyati, S. (2015). Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik. *Jurnal uml*, *2*(2), 21-27

Siswanto, B. D. L., & Abraham, F. Z. (2016). Peran humas pemerintah sebagai fasilitator komunikasi pada biro humas Pemprov Kalimantan Selatan. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, *19*(1). https://doi.org/10.20422/jpk.v19i1.64

Sumber Lain:

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah: 18.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan